

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Meningkatnya aktivitas perdagangan efek, kebutuhan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai perkembangan bursa semakin meningkat. Informasi yang lengkap terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor jasa yang terdaftar di BEI dibagi kedalam empat kategori, yaitu perusahaan jasa sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan, perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, perusahaan jasa sektor keuangan, perusahaan jasa sektor perdagangan dan investasi (www.sahamoke.com).

Salah satu subsektor dari industri sektor jasa ialah *property real estate* dan konstruksi bangunan. Perusahaan *property real estate* dan konstruksi bangunan adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan gedung-gedung fasilitas umum, perumahan, apartemen, dan sarana prasarana penunjang gedung. Adapun pasar *property* di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi kedalam beberapa segmen pasar yaitu, gedung perkantoran (*office building*); retail market yang meliputi swalayan dan mall; apartemen dan kondominium; pasar kawasan industri (*industrial estate market*); dan pasar hotel (*hotel market*).

Pengembangan yang tergabung dalam *Real Estate* Indonesia (REI) memprediksi perbaikan sektor properti akan terjadi pada pertengahan 2017. Menurut Soeleman Soemawinata (Ketua Umum DPP), REI masih optimis akan adanya pertumbuhan di subsektor perumahan karena permintaan pasar yang masih besar. Selain itu, berharap pada perbaikan kondisi ekonomi karena properti sangat terdampak ekonomi global maupun nasional. Beberapa kebijakan yang digulirkan pemerintah seperti penyederhanaan perizinan juga belum berdampak signifikan. Saat ini memang belum terasa karena masih tahap awal, berbagai pembangunan juga baru dimulai dengan *groundbreaking*. Diharapkan diakhir 2017 seluruh kebijakan bisa terasa khususnya bagi dunia properti REI berharap perumahan rakyat bisa terus tumbuh (beritasatu, 2015).

Persatuan Perusahaan *Real Estate* Indonesia (REI) mendukung mewujudkan kota masa depan melalui Indonesia *Future City* (IFC). Menurut Soeleman Soemawinata (Ketua Umum DPP) salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah hadirnya kota masa depan yang maju dan berdaya saing. Hal ini selaras dengan apa yang direncanakan Pemerintah mengenai pembangunan kota masa depan. Oleh karena itu, Soelaeman berani mengatakan bahwa sektor properti mempunyai peran strategis di negeri ini, karena *multipliereffect*-nya yang besar, tertuju kesemua arah, dan berkelanjutan. Sektor ini mampu mengerjakan ratusan industri hulu, menarik investasi baru, memberikan sumbangan retribusi dan pajak ke negara, serta menciptakan lapangan kerja dan ekonomi rakyat. Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas REI 2017, IFC dan REI Mega Expo 2017, Hari Ganie menambahkan, IFC merupakan upaya untuk mendorong mempercepat terbentuknya model kota masa depan (*future city model*) (Sindonews, 2017).

Bank Indonesia (BI) menilai, sektor properti memiliki peran sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Upaya mendorong kinerja sektor properti agar sehat dan kuat merupakan tanggung jawab berbagai otoritas, termasuk Bank Indonesia. "Kebijakan otoritas terkait di sektor properti yang saling bersinergi, dipercaya akan mampu mempercepat perbaikan kinerja sektor properti" kata Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/8/2017)" (www.ekbis.sindonews.com).

1.2 Latar belakang

Banyaknya perusahaan publik di Indonesia yang semakin berkembang pesat. Setiap badan atau perseroan pasti membutuhkan informasi yang utuh. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2017) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Perusahaan publik diwajibkan menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana) dan laporan lain. Di samping itu juga termasuk skedul dengan kemampuan akuntansi.

Laporan keuangan yang dikatakan akurat apabila disajikan secara tepat waktu ketika diperlukan oleh para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, masyarakat, pemerintah, maupun pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Aryaningsih, 2014). Perusahaan publik menerbitkan laporan keuangannya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta harus di audit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru Nomor : 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Pada pasal 7 ayat (1) disampaikan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan tahun keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Pada peraturan baru tersebut, disebutkan juga sanksi-sanksi yang diberlakukan apabila sebuah perusahaan mengalami *audit delay* yaitu peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Pada peraturan tersebut hanya disebutkan sanksi-sanksi nya tetapi tidak dijelaskan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan sanksi tersebut. Peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan mulai tahun 2017. Penelitian ini pada tahun 2012 sampai dengan 2016 menggunakan peraturan lama yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK nomor : KEP-346/BL/2011 nomor 2 butir c.

Salah satu *booming* investasi yang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah investasi di sektor properti. Pada bulan Januari 2016, jumlah emiten dalam sektor *Property Real Estate* dan Konstruksi Bangunan yang tercatat di BEI berjumlah 63 emiten. Pada peringatan tertulis I yang dikeluarkan oleh BEI, terdapat 69 emiten yang mangkir melaporkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016. Berikut adalah daftar emiten yang mendapat peringatan tertulis I yang dikeluarkan oleh BEI. Seperti yang tertera pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Daftar Jenis sektor yang mendapatkan SP I dari Bursa Efek Indonesia yang Berakhir per 31 Desember 2016

No	Jenis sektor	Jumlah Emiten Tercatat	2014	2015	2016
1	Perdagangan, Jasa dan Investasi	126	10	19	20
2	Pertambangan	42	8	11	8
3	Industri Dasar dan Kimia	66	6	8	4
4	Pertanian	20	1	5	5
5	Aneka Industri	41	4	4	4
6	Industri Barang Konsumsi	37	4	4	6
7	<i>Property, Real Estate & Konstruksi Bangunan</i>	63	3	7	6
8	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	60	13	13	10
9	Keuangan	84	3	8	6

(Sumber: www.idx.co.id)

Pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa sektor *Property Real Estate* dan Konstruksi Bangunan merupakan sektor yang perusahaannya mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Dengan melihat fenomena perkembangan perusahaan *property* dan *real estate*, penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan-perusahaan *property* dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian, mengingat bahwa penelitian-

penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitiannya. Pada sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan terdapat beberapa perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan nya. Seperti yang terteta pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Perkembangan Audit Delay pada Perusahaan *Property Real Estate* dan
Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 –
2016

Sektor	Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Property, Real Estate</i>	Agung Podomoro Land Tbk	-	-	-	-	26 hari
	Bakrieland Development Tbk	91 hari	92 hari	28 hari	153 hari	73 Hari
	Eureka Prima Jakarta Tbk (d h Laguna Cipta Griya Tbk	-	37 hari	29 hari	42 hari	27 hari
	Roda Vivatex Tbk	4 hari	-	-	-	-
Konstruksi Bangunan	Nusa Kontruksi Enjiniring Tbk (d h Duta Graha Indah Tbk)	-	-	-	-	21 hari
	Nusa Raya Cipta Tbk	36 hari	-	-	21 hari	-
	Surya Semesta Internusa Tbk	-	-	-	21 hari	-
	Cahayasakti Investindo Sukses Tbk	-	-	-	-	3 hari
	Totalindo Eka Persada Tbk	-	-	-	-	150 hari

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Pada tabel 1.2 tersebut dapat diketahui perusahaan Bakrieland Development Tbk konsisten dalam melakukan keterlambatan laporan keuangan. Perusahaan Bakrieland Development Tbk melakukan keterlambatan dikarenakan adanya restrukturisasi hutang mulai tahun 2012 sampai 2016 dan di tahun 2017 Bakrieland Development Tbk berupaya menyelesaikan semua kegiatan transaksi hutang dengan semua pemegang saham yang berkepentingan dengan Bakrieland Development Tbk melalui anak perusahaannya (www.idx.com).

Jumlah perusahaan yang mengalami *audit delay* sebanyak 9 perusahaan dari 63 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan melihat fenomena perkembangan perusahaan *property real estate* dan konstruksi bangunan penulis tertarik untuk menjadikan perusahaan-perusahaan *property real estate* dan konstruksi bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian, mengingat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitiannya.

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK nomor : KEP-346/BL/2011 nomor 2 butir c diketahui bahwa perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya yang telah di audit selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan apabila terlambat maka BEI akan menerapkan sanksi-sanksi atas keterlambatan tersebut. Dalam kenyataannya, dengan adanya berbagai peraturan serta sanksi-sanksi tersebut masih ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Beberapa perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan maka dari itu dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2005, yaitu peringatan tertulis 1 sampai 3, denda setinggi-tingginya Rp.500.000.000, penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di bursa. Namun demikian ada beberapa perusahaan tidak tepat waktu dan ini telah melanggar keterbukaan informasi di pasar modal. Pada kenyataannya, dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK mengenai standar laporan keuangan dan penyampaian laporan

keuangan serta sanksi yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta KEP-307/BEJ/07-2004 peraturan nomor 1-H : tentang sanksi, setelah peringatan tertulis I maka ada peringatan tertulis II beserta denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila perusahaan masih belum menyampaikan laporan keuangan terhitung dari hari kalender ke-31 sampai dengan hari kalender ke-60. Lalu apabila sampai dengan hari kalender ke-90 perusahaan masih juga belum menyampaikan laporan keuangannya maka BEI akan memberikan peringatan tertulis III serta denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut menimbulkan reaksi negatif dan berkurangnya relevansi laporan keuangan. Selain itu juga dapat merugikan perusahaan terutama pada aspek finansial perusahaan, dikarenakan perusahaan diwajibkan untuk membayar denda. Pada tahun 2016, BEI menjatuhkan peringatan tertulis III beserta denda Rp. 150.000.000 kepada 4 emiten pada sub sektor *property dan real estate* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Ketertundaan laporan keuangan dapat berdampak buruk pada reaksi pasar. Makin lama masa tunda, maka relevansi laporan keuangan semakin diragukan. Selain relevansi laporan keuangan yang semakin diragukan oleh pemegang kepentingan (*stakeholders*), keterlambatan penyampaian laporan keuangan pun dapat merugikan pihak perusahaan dalam segi keuangan. Seperti yang telah dijelaskan pada peraturan Kep-307/BEJ/07-2004 dan perusahaan yang terkena Peringatan Tertulis III akan dikenakan denda sebesar Rp 150.000.000,-. Hal tersebut akan berpengaruh pada keuangan masing-masing perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan.

Pada tahun 2017 BEI memberikan sanksi kepada 6 emiten yang belum memenuhi kewajibannya sebagai anggota di pasar modal. Keenam emiten tersebut diantaranya, PT Bara Jaya International Tbk (ATPK), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Sugih Energi Tbk (SUGI), PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB), PT Yulie Sekurindo Tbk (YULE) dan PT Grahamas Citrawisata Tbk (GMCW). Atas dasar penyebab suspensi tersebut, maka sejak sesi I perdagangan efek 17 Oktober 2016, bursa memutuskan untuk memperpanjang

penghentian sementara perdagangan efek untuk enam perusahaan tercatat, "kata Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI, Imron Hamzah" (<http://www.neraca.co.id>).

Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada Bapepam juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Mantik dan Sujana, 2013). Giwang (2014) menyatakan dengan adanya tanggungjawab auditor yang besar mendorong auditor untuk bekerja dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang mengatur perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian *intern* dan pengumpulan bukti-bukti yang kompeten diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat, selain harus tepat waktu pelaporannya kepada publik, laporan keuangan juga harus diaudit oleh seorang akuntan publik (Owusu-Ansah, 2000).

Banyaknya di Indonesia fenomena mengenai keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang telah dijabarkan, oleh karena itu dapat dilihat bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan atau yang biasa disebut *audit delay* masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan *audit delay* diantaranya adalah profitabilitas, opini audit dan kualitas audit.

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka dari itu profit merupakan berita baik bagi perusahaan. Profitabilitas bisanya dilihat dari laporan laba rugi perusahaan, karena dalam laporan laba rugi perusahaan dapat menunjukkan kinerja suatu perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Rachmawati (2008) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik, mereka juga memberi alasan bahwa auditor yang menghadapi perusahaan yang mengalami kerugian memiliki respon yang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan

proses pengauditan. Menurut Kartika (2011) informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah kemungkinan akan meminta auditornya untuk memperpanjang waktu audit lebih lama dari biasanya (Carslaw dan Kaplan, 1991).

Menurut Subekti dan Widiyanti (2004), banyak faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *audit delay* pada suatu perusahaan, salah satunya adalah opini auditor. Opini yang dihasilkan oleh auditor dapat mempengaruhi lama dari keluarnya laporan audit, karena dalam proses pemberian opini tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* auditor, dan lain sebagainya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) (PSA No. 29 SA Seksi 508 butir 10) terdapat lima tipe pendapat auditor, yaitu : Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan bahasa penjelasan, pendapat ini terjadi apabila dalam keadaan tertentu mengharuskan auditor menambah satu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya; Pendapat Wajar dengan Pengecualian, pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan; Pernyataan Tidak Wajar, pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat, pendapat ini menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Opini audit dapat mempengaruhi audit delay karena apabila opini audit nya selain *unqualified* maka auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami dan mencari bukti audit sebagai landasan dalam memberikan opini audit

selain *unqualified* tersebut. Perusahaan yang mendapatkan opini *unqualified* biasanya hanya membutuhkan waktu yang cepat karena tidak adanya proses negosiasi antara perusahaan dengan KAP, sedangkan perusahaan yang mendapatkan opini *qualified* akan mempunyai waktu *audit delay* yang lebih lama dibandingkan dengan perusahaan dengan opini yang berbeda. Namun hasil yang berbeda diungkapkan oleh Putri (2015) menyebutkan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut SK. Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 sebagaimana telah diubah dengan SK. Menkeu NO.4701/KMK.017/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 dalam Jusup (2001, h.19), Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang meminta ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big4)*.

Penelitian ini mengukur kualitas audit dengan menggunakan model *earnings surprise benchmark* yang dikembangkan dari pengukuran kualitas audit Model Carey dan Simnett (2006) yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia. Studi ini menggunakan *earnings surprise benchmark* sebagai proksi dari kualitas audit dengan argumen berikut : *earnings surprise benchmark* adalah ukuran kualitas audit yang relatif baru dan didukung oleh argumen yang kuat tentang hubungannya dengan kualitas audit, penggunaan *Earnings Surprise Benchmark* sebagai proksi dari kualitas audit dalam studi ini disempurnakan dalam penentuan *benchmark*.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya kualitas audit diukur dengan ukuran KAP. Kartika (2009) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Ahmad dan Kamarudin (2000), Utami (2006), dan Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur audit, terutama melalui penggunaan *earnings surprise benchmark* sebagai metode

pengukuran kualitas audit yang baru berkembang. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan profesi AP maupun regulator dalam meningkatkan kualitas jasa audit.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian yang ada dan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaruh Profitabilitas, Opini Audit dan Kualitas Audit terhadap *Audit Delay*. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas, Opini Audit dan Kualitas Audit terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Emiten Sektor *Property Real estate* dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2016)”.

1.3 Perumusan masalah

Sampai saat ini masih terdapat perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Keterlambatan pelaporan keuangan audit yang terjadi dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK nomor : KEP-346/BL/2011 nomor 2 butir c diketahui bahwa perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya yang telah di audit selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan apabila terlambat maka BEI akan menerapkan sanksi-sanksi atas keterlambatan tersebut. Perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan merupakan sektor yang emiten-emitenya mempunyai keterlambatan laporan auditan. Tahun 2017 BEI memberikan sanksi kepada emiten yang belum memenuhi kewajibannya sebagai anggota di pasar modal. Emiten tersebut salah satu diantaranya, PT Bakrieland Development Tbk (ELTY). Perusahaan Bakrieland Development Tbk melakukan keterlambatan dikarenakan adanya restrukturisasi hutang mulai tahun 2012 sampai 2016 dan di tahun 2017 Bakrieland Development Tbk berupaya menyelesaikan semua kegiatan transaksi hutang dengan semua pemegang saham yang berkepentingan dengan Bakrieland Development Tbk melalui anak perusahaannya. Atas dasar penyebab suspensi tersebut, maka sejak

sesi I perdagangan efek 17 Oktober 2016, BEI memutuskan untuk memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek untuk sembilan perusahaan tercatat.

Pemilihan variabel independen ini dilakukan karena masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya sehingga masih relevan untuk dikaji kembali mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Faktor internal yang berpengaruh terhadap *audit delay* ialah profitabilitas. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap *audit delay* opini audit dan kualitas audit.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji hubungan antara Profitabilitas, Opini Audit dan Kualitas Audit terhadap *Audit Delay* Perusahaan sektor *Property Real Estate* dan Konstruksi Bangunan Tahun 2012-2016. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profitabilitas, opini audit, kualitas audit dan *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas, opini audit dan kualitas audit secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh parsial dari :
 - a. Profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
 - b. Opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
 - c. Kualitas audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profitabilitas, opini audit, kualitas audit dan *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan profitabilitas, opini audit dan kualitas audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
3. Bagaimana pengaruh parsial dari :
 - a. Profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
 - b. Opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?
 - c. Kualitas audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pengaruh profitabilitas, opini audit dan kualitas audit terhadap *audit delay* ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Aspek teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai berhubungan dengan pengembangan pengetahuan hasil penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai *audit delay* yang terkait dengan faktor-faktor nya yaitu

profitabilitas, opini audit dan kualitas audit pada perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai berhubungan dengan pengembangan pengetahuan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Profesi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi auditor untuk lebih mencermati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya *audit delay* dikemudian hari.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pengambilan keputusan sehingga perusahaan dapat meminimalisir resiko terjadinya *audit delay*.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian menggunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit delay*. Variabel independen yang digunakan untuk meneliti pengaruh *audit delay* adalah profitabilitas, opini audit dan kualitas audit. Penelitian ini mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang diprediksi akan mempengaruhi *audit delay*.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia melalui website resminya (www.idx.co.id) dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan. Data penelitian ini

diambil laporan tahunan resmi perusahaan yang berada di *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juli 2018. Periode penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan sektor *property real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berhubungan dengan fenomena yang diangkat untuk menjadi pokok bahasan, rumusan masalah yang menjabarkan identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktik, ruang lingkup penelitian yang berisi batasan dan cakupan penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang memuat tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang menjawab atau menjelaskan masalah penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, serta validitas dan reliabilitas.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Setiap aspek pembahasannya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan diikuti oleh penarikan kesimpulan yang dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

HALAMAN INI SEGAJA DIKOSONGKAN